



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 43 TAHUN 2009

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja guna meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2009.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
6. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.
7. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
9. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi Instansi Pemerintah.
10. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi: (1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

12. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh SKPD dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya serupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut.
15. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan program dan kebijakan.
16. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan :
 - a. untuk memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
 - b. untuk memberikan ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENGEMBANGAN, PEMILIHAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 3

- (1) Indikator kinerja utama dijabarkan dalam :
 - a. indikator kinerja agenda;
 - b. indikator kinerja program.
- (2) Rincian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Dalam penyusunan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berpedoman pada RPJMD Provinsi Banten 2007-2012.

Pasal 5

Dalam pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a. dokumen RPJMD, Renstra, Kebijakan Umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah;

- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 6

- (1) Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama disesuaikan dengan karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi pada SKPD.
- (2) Karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut :
 - a. spesifik;
 - b. dapat dicapai;
 - c. relevan;
 - d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
 - e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

BAB III

PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 7

Indikator kinerja utama digunakan oleh SKPD, untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Provinsi Banten; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program atau kegiatan-kegiatan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 31 Maret 2009

GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 31 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**



MUHADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 NOMOR .43

INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

NO	URAIAN	SATUAN	TARGET
a.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	70,65
b.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,69
c.	Indeks Pembangunan Daerah (IPD)	%	81,77
d.	Indeks Pembangunan Gender	%	63,00
e.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	52,00
f.	Jumlah Penduduk Sangat Miskin	Jiwa	788.067
g.	Prosentase Rumah Tangga Miskin (RTM)	%	29,60
h.	Jumlah Pengangguran Terbuka	Jiwa	676.560
i.	Prosentase Pengangguran Terbuka	%	6,50

B. INDIKATOR KINERJA AGENDA :

B.1 AGENDA PEMERINTAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Indeks Keberdayaan Pemerintah Provinsi Banten (s/d 2012 = 36 %)	%	32,28
2.	Indeks Kapabilitas Aparatur	%	40,91
3.	Indeks Keuangan Daerah	%	27,36
4.	Indeks Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	21,41
5.	Indeks Pemberdayaan Gender	%	52

B.2 AGENDA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Indeks Keberdayaan Masyarakat (maks 42% dr Indeks Pembangunan Daerah)	%	28,26
2.	Indeks Keberdayaan Kependudukan dan Tenaga Kerja (maksimal 23% dari Indeks keberdayaan masy)	%	16,93
3.	Indeks Derajat Kesejahteraan Rakyat (maksimal 52% dari Indeks keberdayaan masy)	%	28,50
4.	Indeks Keberdayaan SOSPOLBUD (maksimal 25% dari Indeks keberdayaan masy)	%	22,29
5.	Angka Kematian Bayi	per 1.000 kh	28
6.	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kh	226
7.	Umur Harapan Hidup	Tahun	68
8.	IPM Banten	%	69,50
9.	% RTM terhadap Total RT	%	29,50
10.	IDG	%	52
11.	PM-G	%	63

B.3 AGENDA EKONOMI DAN INDUSTRI

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	LPE Banten	%	4,75
2.	Pendapatan per Kapita	Rp.	11.600.000
3.	Rasio Kontribusi Sektor Pertanian dan Pertambangan terhadap Total PDRB	%	8,36
4.	Rasio Nilai Tambah Industri terhadap Total Nilai Tambah	%	59,80
5.	Indeks Ekonomi Wilayah	%	21,44
6.	Tingkat Daya Beli Masyarakat	%	-4,25
7.	Tingkat inflasi	%	9
8.	NTP (≥ 1)	%	96
9.	Indeks Pemberdayaan Gender	%	52

B.4 AGENDA PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KAWASAN

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Indeks Perkembangan Wilayah	%	16,64
2.	Indeks Fasilitas Publik	%	37,92
3.	Indeks Ekonomi Wilayah	%	15,29
4.	Indeks Kondisi Fisik Daerah	%	22,44

C. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

C.1 AGENDA PEMERINTAHAN

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
			URAIAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan sarana - prasarana aparatur pemerintah yang memadai	Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan	15,78%
			Rasio Penyediaan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan SKPD	14,50%
			Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan keluar daerah	32,08%
			Rasio Pembangunan, Pengandaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	15,36%
			Rasio Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan SKPD	11,92%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan sarana - prasarana aparatur pemerintah yang memadai	Rasio Penyediaan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan SKPD	8,21%
3	Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Meningkatnya pemerataan / penempatan sumberdaya aparatur	Cakupan fasilitasi PNS pindah dan purna tugas yang memperoleh pembekalan/ penghargaan	100,00%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Ketersediaan sarana - prasarana aparatur pemerintah yang memadai	Rasio Pembangunan, Pengandaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	15,36%
			Rasio Penyediaan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan SKPD	14,50%
			Rasio Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan SKPD	11,92%
			Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan keluar daerah	32,08%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan sarana - prasarana aparatur pemerintah yang memadai	Rasio Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan SKPD	11,92%
			Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan keluar daerah	32,08%
			Rasio Penyediaan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan SKPD	14,50%
6	Pembinaan Dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan ,keperintisan Dan Kejuangan (NK3)	Peningkatan derajat kepercayaan masyarakat dan kualitas kesadaran hukum masyarakat	Jumlah Gangguan Kemanan thd Aktivitas Masyarakat dan Dunia Usaha (asumsi maximal = 12%)	12,00%
7	Penataan Administrasi Kependudukan	Penataan daerah otonom dalam rangka layanan publik	Rasio Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pemerintahan	40,00%
		Ketersediaan sarana - prasarana aparatur pemerintah yang memadai	Rasio Penyediaan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan SKPD	14,50%
8	Penataan Daerah Otonomi Baru	Penataan daerah otonom dalam rangka layanan publik	Rasio Koordinasi dan fasilitasi Penataan Daerah Otonom Baru	100,00%

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
			URAIAN	TARGET
1	2	3	4	5
9	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang pemerintahan desa dan kapasitas kelembagaan desa	Jumlah Desa dan Kelurahan Teladan pd Tingkat Provinsi per tahun	0,48%
			Rasio Desa Yang Mengalami penguatan fungsi BPD / kelembagaan aparatur pemerintahan desa terhadap jumlah desa keseluruhan	12,08%
			Rasio Desa yang mengalami penguatan KPM	40,00%
10	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Penguatan komunikasi pemerintahan antara Pemda dan DPRD	Rasio Nota Kesepakatan Pemda dengan DPRD	100,00%
		Peningkatan harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya	Rasio Aspirasi Masyarakat yang terakomodir dalam Anggaran Pembangunan	100,00%
11	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang pemerintahan desa dan kapasitas kelembagaan desa	Rasio Desa yang mengalami penguatan KPM	40,00%
12	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kerjasama pemerintahan	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Pembangunan dengan Pemerintahan Perbatasan, Regional dan Bilateral	50,00%
		Penggalangan sumber-sumber pendanaan diluar APBD (Non APBD) dan APBN serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah	Rasio Jumlah Kesepakatan diluar Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota yang direalisasikan	50,00%
13	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang pemerintahan desa dan kapasitas kelembagaan desa	Rasio Desa Yang Mengalami penguatan fungsi BPD / kelembagaan aparatur pemerintahan desa terhadap jumlah desa keseluruhan	12,08%
14	Peraturan Perundang-Undangan	Sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah, antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan kebutuhan, perencanaan strategis, dan pelayanan publik	Jumlah Sosialisasi dan diseminasi produk hukum pusat, provinsi dan kabupaten / kota	70,00%
15	Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Program dan Anggaran Pembangunan	2 dok
		Tersedianya dokumen penganggaran sesuai kinerja dan kebutuhan	Jumlah Dokumen Penganggaran Tahunan Daerah	2 dok
		Tersedianya dokumen perencanaan sesuai kebutuhan masyarakat	Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan Daerah	1 dok
16	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Program - Program Strategis	Jumlah RAD Penanggulangan Kemiskinan	1 dok

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
			URAIAN	TARGET
1	2	3	4	5
17	Perencanaan Sosial dan Budaya	Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Program - Program Strategis	Jumlah Dokumen Perencanaan KHPPIA (Kelangsungan Hidup, Pertumbuhan Perkembangan dan Perlindungan Ibu dan Anak)	1 dok
			Jumlah RAD Penanggulangan Kemiskinan	1 dok
		Tersedianya dokumen perencanaan sesuai kebutuhan masyarakat	Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan Daerah	1 dok
		Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Program dan Anggaran Pembangunan	2 dok
		Sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah, antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan kebutuhan, perencanaan strategis, dan pelayanan publik	Jumlah Sosialisasi dan diseminasi produk hukum pusat, provinsi dan kabupaten / kota	70,00%
		Ketersediaan sarana - prasarana aparatur pemerintah yang memadai	Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan keluar daerah	32,08%
18	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	7 dok
		Penyusunan pedoman perencanaan dan pelaksanaan penganggaran pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pedoman Perencanaan Anggaran (ASB, SSH dan Ped. RKA)	2 dok
19	Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur	Penerapan insentif berbasis kinerja untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Rasio Belanja Pegawai dalam Total Belanja Tidak Langsung	25,00%
		Pemanfaatan pegawai untuk penanganan program/kegiatan strategis pembangunan	Rasio Pembinaan dan Peningkatan Disiplin serta Profesionalisme SDM Aparatur	12,33%
		Meningkatnya pemerataan / penempatan sumberdaya aparatur	Cakupan pembinaan mental, disiplin, kompetensi dan peningkatan sumber daya aparatur serta penataan administrasi bidang kepegawaian	20,00%
			Cakupan fasilitasi PNS pindah dan purna tugas yang memperoleh pembekalan/ penghargaan	100,00%
		Pemantapan budaya kerja aparatur yang profesional dan cerdas dan sesuai aturan formal	Rasio Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Seminar, Lokakarya, Workshop serta Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	20,00%
20	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tidak Kriminal	Peningkatan peran serta dan kualitas satuan Linmas dan Satpol PP dlm pemeliharaan ketertiban umum	Rasio operasi penegakan perda dan kepatuhan masyarakat terhadap perda	100,00%
21	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Rasio Pembentukan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel;	Rasio Kelembagaan / SKPD terhadap Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Pilihan Pembangunan	91,30%

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
			URAIAN	TARGET
1	2	3	4	5
22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel diseluruh tingkatan pemerintahan daerah.	Rasio Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap jumlah obyek pemeriksaan	85,00%
23	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Ketersediaan sarana - prasarana aparatur pemerintah yang memadai	Rasio Pembangunan, Penggandaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	15,36%
		Rasio Pembentukan Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BNP, Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Peternakan Kehutanan, KPAID, KPID, BKSP, SET KORPRI, Komisi Aid dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu)	Rasio Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat Daerah	30,00%
		Rasio Pembentukan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rasio Kelembagaan / SKPD terhadap Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Pilihan Pembangunan	91,30%
24	Program Penataan Perundang-Undangan	Sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah, antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan kebutuhan, perencanaan strategis, dan pelayanan publik	Jumlah Sosialisasi dan diseminasi produk hukum pusat, provinsi dan kabupaten / kota	70,00%
25	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Peningkatan kualitas kesadaran hukum dan politik	Rasio Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Sosialisasi Pemahaman Nilai-nilai Ideologi Bangsa	100,00%
26	Program Pengembangan Data / Informasi	Ketersediaan sarana - prasarana aparatur pemerintah yang memadai	Rasio Penyediaan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan SKPD	14,50%
			Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan	15,78%
27	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Penerapan norma, standar dan prosedur telematika dan informatika	Rasio Penyusunan dan sosialisasi aturan perundang - undangan, norma, prosedur dan standar pelayanan di bidang telematika dan informatika	21,45%
		Penerapan layanan telematika dan informatika yang terpadu, aksesibilitas tinggi, dan kapasitas mencukupi	Rasio Pengembangan Pelayanan Telematika dan Informatika yang terpadu dengan memanfaatkan penggunaan teknologi	12,85%
		Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Rasio Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Telematika dan Informatika	39,80%
28	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan derajat kepercayaan masyarakat dan kualitas kesadaran hukum masyarakat	Jumlah Gangguan Kemanan thd Aktivitas Masyarakat dan Dunia Usaha (asumsi maximal = 12%)	12,00%
		Peningkatan kualitas kesadaran hukum dan politik	Rasio fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat dan sosialisasi pemahaman nilai-nilai ideologi bangsa	100,00%

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
			URAIAN	TARGET
1	2	3	4	5
29	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Rasio Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Telematika dan Informatika	39,80%
30	Program Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Ketersediaan sarana - prasarana aparatur pemerintah yang memadai	Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan keluar daerah	32,08%
			Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan	15,78%
32	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel diseluruh tingkatan pemerintahan daerah.	Rasio Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap jumlah obyek pemeriksaan	85,00%
31	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Rasio Pembentukan Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BNP, Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian Peternakan Kehutanan, KPAID, KPID, BKSP, SET KORPRI, Komisi Aid dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu)	Rasio Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat Daerah	30,00%
32	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Rasio Pembentukan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rasio Kelembagaan / SKPD terhadap Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Pilihan Pembangunan	91,30%
33	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Program - Program Strategis	Jumlah RAD Penanggulangan Kemiskinan	1 dok
		Tersedianya dokumen perencanaan sesuai kebutuhan masyarakat	Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan Daerah	1 dok
34	Program Perencanaan Pembangunan SKPD	Penyusunan pedoman perencanaan dan pelaksanaan penganggaran pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pedoman Perencanaan Anggaran (ASB, SSH dan Ped. RKA)	2 dok
		Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Program dan Anggaran Pembangunan	2 dok

C.2 AGENDA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
			URAIAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Meningkatnya APK jenjang pendidikan menengah (SMP/MTs/SMPL/Paket B/Wustho)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Wustho	95,75%
		Meningkatnya Rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) tingkat SLTP	Rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) tingkat SLTP	6,54
		Meningkatnya angka partisipasi sekolah murni (APM) jenjang SD (termasuk SDLB dan MI)	APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A	97,15%
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	Rasio Jumlah Puskesmas thd Jumlah penduduk	40 Unit/Orang
3	Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Kesehatan	Meningkatnya sumber daya, sistem informasi dan penelitian kesehatan masyarakat	Institusi Pendidikan Kesehatan yang telah terakreditasi	100%
			Jumlah penelitian bidang kesehatan	2 dok
4	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	Cakupan tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan sehat (TTU, TPM)	65,00%
			Cakupan Kab./Kota Sehat	1 kab/kota
5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya minat baca penduduk.	Jumlah pengunjung pada TBM, perpustakaan dan Perpustakaan keliling	20,00%
		Terkelolanya arsip dan dokumen daerah	Rasio Pelayanan administrasi kearsipan	20,00%
6	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit rujukan tingkat Provinsi	Pembangunan Gedung Rumah Sakit Rujukan Tingkat Provinsi	30,00% /gedung
			Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Rujukan Tingkat Provinsi	30,00% /gedung
7	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terjaminnya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial	Pelatihan TAGANA	200 orang
			Paket Bantuan Darurat Lauk Pauk (Buffer Stock)	1500 orang
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Tertanggulangnya Penyakit Menular dan Tidak Menular	Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Screening)	20,00%
9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Tertanggulangnya Penyakit Menular dan Tidak Menular	Penanganan Kasus HIV/AIDS yang perlu ARV (Anti Retroviral Virus)	70,00%
			Penanganan Kasus Diare pada balita	40,00%
			Penanganan Kasus Kusta	82,00%
			Penanggulangan Kasus DBD	90,00%
			Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100,00%

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
			URAIAN	TARGET
1	2	3	4	5
10	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien miskin	100,00%
			Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi Gakin	100,00%
11	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terlaksananya pengawasan obat	Penyediaan obat buffer stock provinsi	29,72%
12	Pogram Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya kualitas gizi masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	80,00%
13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terbangunannya Sport Centre	Pembangunan Sport Centre / Pengembangan PPLP	2 kawasan
14	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya Organisasi kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan kewirausahaan dan kepemimpinan	Rasio Organisasi/Kelompok kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan kewirausahaan dan kepemimpinan (total 46 organisasi/Kel)	20,00%
15	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimum S.1/D.IV terhadap jumlah guru keseluruhan	Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimum S.1/D.IV terhadap jumlah guru keseluruhan	30,40%
		Meningkatnya Mutu Tenaga Kependidikan	Rasio Jumlah Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya	20,00%
		Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non Formal	Rasio Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non Formal yang telah memiliki uji kompetensi	60,00%
16	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan	50,00%
17	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan Anak	Meningkatnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)	RAD PKHP	1 dok
18	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Meningkatnya Akses RTM terhadap layanan permodalan usaha	Rasio Jumlah RTM yang akses terhadap layanan modal usaha (target RTM 205.198)	45,00%
19	Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Terbinanya cabang olahraga yang berprestasi dan meningkatnya kegiatan olahraga di masyarakat	Jumlah organisasi/ perkumpulan olahraga masyarakat yang dibentuk/dibina (total s/d 2012 sebesar 53 perkumpulan)	18,87%
20	Pendidikan Tinggi	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PT/PTA	Angka Partisipasi Kasar (APK) PT/PTA	10,25%
21	Pendidikan Non Formal	Menurunnya Angka Buta Aksara penduduk berusia 15 tahun keatas	Angka Buta Aksara penduduk berusia 15 tahun keatas	8,75%
		Meningkatnya akses Prasekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	17,00%
		Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A/Ula	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A/Ula	97,15%
		Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Wustho	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Wustho	95,75%
		Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non Formal	Rasio Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non Formal yang telah memiliki uji kompetensi	60,00%

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
			URAIAN	TARGET
1	2	3	4	5
22	Pendidikan Menengah	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C	61,60%
		meningkatnya Rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) tingkat SLTA	Rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) tingkat SLTA	6,68
23	Pendidikan Luar Biasa	Meningkatnya Rasio Jumlah Siswa yang Mengikuti Pendidikan Luar Biasa pada Tingkat SD, SMP, SMA dan Sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A/Ula	97,15%
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Wustho	95,75%
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C	61,60%
24	Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya akses Prasekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	17,00%
25	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia, Anak, Penyandang Cacat, Tuna Sosial dan eks Korban Napza/HIV/AIDS	Pembinaan Eks Kusta	60 orang
			Pembinaan Paca dan eks Trauma	20 orang
26	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia, Anak, Penyandang Cacat, Tuna Sosial dan eks Korban Napza/HIV/AIDS	Eks Narapidana	25 orang
			Terselenggaranya Bimbingan Pencegahan Penyalahgunaan Napza dan HIV/AIDS	250 orang
27	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Terbinanya cabang olahraga yang berprestasi dan meningkatnya kegiatan olahraga di masyarakat	Jumlah organisasi/ perkumpulan olahraga masyarakat yang dibentuk/dibina (total s/d 2012 sebesar 53 perkumpulan)	18,87%
			Jumlah cabor yg dibina (Atlet, Wasit dan Pelatih) / Event OR	20 Cabor / 5 Event
28	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Pemberdayaan Perempuan	Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang diberdayakan	100 KK
			Pemetaan KAT	70 KK
			Pemberdayaan KAT Tahun I	40 KK
			Pemberdayaan KAT Tahun II	30 KK
		Meningkatnya Akses RTM terhadap layanan permodalan usaha	Rasio Jumlah RTM yang akses terhadap layanan modal usaha (target RTM 205.198)	45,00%
29	Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi PMKS dan Panti	Bimbingan Lanjut bagi WTS	30 orang
			Bimbingan Lanjut bagi Gepeng	30 orang
			Bimbingan Lanjut bagi Remaja Putus Sekolah	30 orang
			Bimbingan Lanjut bagi eks Napi	30 orang
			Lanjut Usia	50 orang
			Wanita Korban Tindak Kekerasan (WKTK)	20 orang
			Tuna Grahit	5 orang
			Balita Terlantar	5 orang
			Korban Tindak Kekerasan (KTK)	20 orang
Pemberian Bantuan Stimulan	24 paket			

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
			URAIAN	TARGET
1	2	3	4	5
30	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya Rasio ketersediaan instrumen pengelolaan pelayanan pendidikan terhadap kebutuhan instrumen keseluruhan	Rasio ketersediaan instrumen pengelolaan pelayanan pendidikan terhadap kebutuhan instrumen keseluruhan	100,00%
		Meningkatkan persentase siswa yang lulus ujian akhir pada setiap jenjang pendidikan	Rasio Siswa yg lulus ujian nasional pd semua jenjang pendidikan	95,00%
31	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)	RAD PKHP	1 dok
32	Keluarga Berencana	Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan Peserta KB aktif	80,00%
33	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan Kunjungan Bayi (KN)	88,00%
34	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terbina dan Meningkatnya Peran Karang Taruna, TKSM, Orsos dan Dunia Usaha	K3S	80 orang
			FK PSM	80 orang
			PSM	100 orang
			Karang Taruna	80 orang
			Orsos/LSM	100 orang
		Terlaksananya Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial	UGB & PUB dari Unsur SKPD Provinsi dan Kab/Kota	20 orang
			UGB & PUB terhadap Dunia Usaha & Lembaga Sosial	20 orang
			Sosialisasi UGB & PUB dari Unsur Masyarakat	100 orang
			Jaminan Sosial bagi PMKS/ Orsos	20 orang
35	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Masyarakat Pekerja Formal dan Informal di Provinsi Banten	Jumlah perusahaan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja	125 perusahaan
			Jumlah Pembinaan dan fasilitasi pelayanan kesehatan kerja sektor formal dan informal	75 orang

C.3 AGENDA EKONOMI DAN INDUSTRI

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
			URAIAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Produksi perikanan tangkap	122.500 ton
2	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pelestarian adat dan pengembangan budaya daerah	Jumlah pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah	4 kali
3	Pengelolaan Keragaman Budaya	Peningkatan sarana dan prasarana seni dan budaya daerah yang representatif	Jumlah sarana dan prasarana seni budaya daerah yang memadai	1 paket
4	Pengembangan Destinasi Parawisata	Meningkatnya pemasaran kebudayaan dan pariwisata	Jumlah pelaksanaan event / promosi	5 kali
		Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	10 obyek
		Peningkatan kemitraan Pariwisata	Jumlah kemitraan dengan usaha jasa pariwisata	5 kali
5	Pengembangan Budidaya Perikanan	Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Produksi benih perikanan	1.000 jt ekor
			Produksi perikanan budidaya	99,68 ton
6	Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Peningkatan kemitraan Pariwisata	Jumlah kemitraan dengan usaha jasa pariwisata	5 kali
7	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya aktivitas ekonomi UMKM-K	2,31%
8	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	5 kali
9	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi di daerah	Terciptanya iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan minat dan realisasi investasi	Jumlah realisasi nilai investasi pma/pmdn	10,8 Trilyun
10	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pengentasan kemiskinan	Meningkatnya rata - rata pendapatan UMKM-K	16,61%
11	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya minat dan realisasi investasi	Peningkatan Volume Perdagangan	7,10%
			Peningkatan Pelayanan Masyarakat	9,00%
		Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi untuk mendukung minat dan realisasi investasi	Promosi Perdagangan	4,50%
12	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan disekitar hutan	Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan sekitar Hutan	5 lokasi

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
			URAIAN	TARGET
1	2	3	4	5
13	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Peningkatan pendapatan pembudidaya dan nelayan	NTP nelayan dan pembudidaya	100,00%
14	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Penyelesaian kasus pelanggaran	12 kasus
15	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan disekitar hutan	Pembinaan industri/usaha kehutanan dan perkebunan	100 industri
16	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan disekitar hutan	Penertiban Peredaran Hasil Hutan	6 kab/kota
17	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya aktifitas ekonomi UMKM-K	2,31%
18	Program Pengembangan Transmigrasi Regional	Pengentasan kemiskinan	Meningkatnya kesempatan kerja	7,00%
19	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan	Meningkatnya penerapan dan pengembangan IPTEK dan Kompetensi industri serta aspek kemasan HAKI bagi IKM	Peningkatan produktifitas industri	6,20%
		Terciptanya iklim yang kondusif terhadap pengembangan klaster industri potensial (TPT, Alas kaki, petrokimia, logam dn mesin) di Provinsi Banten	Pengembangan Klaster industri potensial	4,5%
		Meningkatnya Kualitas dan keragaan serta diversifikasi produk-produk IKM ciri khas daerah	Peningkatan produksi ikm	7,50%
20	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Luas pengembangan dan rehabilitasi tanaman perkebunan	390, ha
21	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 9,5 % pada akhir tahun 2012	Rasio Jumlah Pengangguran Terbuka Terhadap jumlah Angkatan kerja	15,34%

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
			URAIAN	TARGET
1	2	3	4	5
22	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Kemampuan memanfaatkan ketersediaan pangan sesuai dengan pedoman gizi seimbang	Indeks Tingkat Kerentanan Pangan	4,08%
			Ketersediaan pangan dari sektor kehutanan dan perkebunan	100 ton
		Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Indeks Akses Pangan dan Pendapatan Masy	4,72%
		Ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan merata	Indeks Ketersediaan Pangan Daerah	3,83%
		kemampuan memperoleh pangan dengan cara yang legal dan diterima secara sosial budaya	Indeks Pemanfaatan dan Penyerapan Pangan	2,66%
23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Produktivitas dan Produksi Tanaman Perkebunan	11,50%
24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Luas Pengembangan dan Rehabilitasi Lahan Tanaman Perkebunan	390, ha
		Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Rasio Akses Pangan dan Pendapatan Masy	4,72%
25	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Revitalisasi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petani	10 pok
			Peningkatan aneka usaha kehutanan dan perkebunan	8 unit
			Peningkatan produksi tanaman perkebunan, khususnya tujuh komoditas unggulan(kakao, sawit, karet, aren, kelapa, kopi, cengkeh)	9,55%
			Luas pengembangan dan rehabilitasi tanaman perkebunan	300 ha
26	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya penerapan dan pengembangan IPTEK dan Kompetensi industri serta aspek kemasan HAKI bagi IKM	Peningkatan produktivitas industri	6,20%

C.4 AGENDA PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KAWASAN

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		
			URAIAN	TARGET	
1	2	3	4	5	
1	Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Meningkatnya Fungsi Koordinasi dan Perencanaan Penataan Ruang Daerah	Rasio Keterpaduan Perencanaan Tata Ruang Wilayah (Jml Dok Rencana Tata Ruang Wil dan Kawasan yang sdh ada thd Jml Dok TR Wil dan Kawasan yang direncanakan)	3,14%	
2	Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut	Meningkatnya fungsi dan luas kawasan lindung mencapai kondisi 30 % luas wilayah melalui koordinasi penataan ruang daerah	Peningkatan luas kawasan konservasi laut	1 ha	
3	Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan pada kondisi mantap 80 -90 % (rata – rata pada ruas jalan nasional, provinsi dan kabupaten / kota) dengan prioritas penanganan pada kawasan strategis (industri dan pariwisata)	Rasio Ruas Jalan dan Jembatan kondisi "Mantap" di Status Provinsi di WKP III (Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak)	65,00%	
4	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Meningkatnya pemanfaatan air baku yang berasal dari pengelolaan air sungai, waduk, situ dan embung oleh Rumah Tangga	Volume Air Baku	47.000.000 m3	
5	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Meningkatnya penyediaan Infrastruktur perumahan dan permukiman	Rasio ketersediaan air bersih dan sanitasi di WKP I, II dan III	20,00%	
			Rasio pembangunan Gedung Perkantoran di KP3B	21,43%	
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya penyelenggaraan transportasi yang terpadu, aman, tertib dan ramah lingkungan	Rasio pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan transportasi	7,33%	
			Meningkatnya penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan informatika dengan aksesibilitas serta kapasitas yang memadai.	Rasio pembinaan pelayanan Pos dan Telekomunikasi	11,93%
				Rasio Pengembangan Telematika dan Informatika	4,20%
7	Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya air untuk pengendalian daya rusak	Rasio perbaikan badan sungai dan situ di WKP I, II dan III	18,04%	

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
			URAIAN	TARGET
1	2	3	4	5
8	Program Pembangunan Turap /Talud /Bronjong	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya air untuk pendaya gunaan air	Rasio peningkatan dan rehabilitas jaringan irigasi teknis di WKP I, II, dan III	60,27%
9	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Meningkatnya pengendalian terhadap perusahaan pertambangan dan energi	Rasio Jumlah perusahaan yang mentaati peraturan perundang-undangan bidang pertambangan	9,74%
			Rasio Jumlah perusahaan yang mentaati peraturan perundang-undangan bidang energi dan ketenagalistrikan	8,86%
			Rasio Jumlah perusahaan yang mentaati peraturan perundang-undangan bidang air tanah	11,36%
10	Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Meningkatnya pengembangan bidang energi dan ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (Banten Terang 2012)	74,70%
11	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Pertambangan Dan Energi	Meningkatnya pengembangan bidang pertambangan dan geologi	Rasio jumlah pemetaan potensi sumberdaya mineral, batu bara dan panas bumi	9,00%
		Meningkatnya pengusahaan bidang pertambangan dan energi	Rasio promosi produk dan potensi pertambangan	17,95%
12	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi ,Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Air untuk konservasi	Rasio Peningkatan Perlindungan sumber-sumber air di WKP I, II dan III	23,87%
13	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya air untuk pendaya gunaan air	Rasio peningkatan dan rehabilitas jaringan irigasi teknis di WKP I, II, dan III	60,27%
14	Program Pengembangan Komunikasi Informasi Dan Media Massa	Meningkatnya Penyediaan fasilitas Transportasi	Rasio penyediaan fasilitas perhubungan Darat	8,06%
			Rasio penyediaan fasilitas perhubungan Laut	8,06%
			Rasio penyediaan fasilitas perhubungan Udara	8,06%
15	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai ,danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Meningkatnya fungsi dan luas kawasan lindung mencapai kondisi 30 % luas wilayah melalui koordinasi penataan ruang daerah	Rasio Luas Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah	78,00%
16	Program Pengendalian Banjir	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya air untuk pengendalian daya rusak	Rasio perbaikan badan sungai dan situ di WKP I, II dan III	18,04%

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
			URAIAN	TARGET
1	2	3	4	5
17	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Meningkatnya penyelenggaraan transportasi yang terpadu, aman, tertib dan ramah lingkungan	Rasio pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan transportasi	7,33%
18	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Fungsi Koordinasi dan Perencanaan Penataan Ruang Daerah	Rasio Keterpaduan Perencanaan Tata Ruang Wilayah (Jml Dok Rencana Tata Ruang Wil dan Kawasan yang sdh ada thd Jml Dok TR Wil dan Kawasan yang direncanakan)	3,14%
19	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup melalui berkurangnya kualitas pencemaran air dan udara pada tingkat kriteria baik (ABM 50)	Rasio Ambang Baku Mutu Air Limbah	10,54%
			Rasio Ambang Baku Mutu Emisi Gas	28,57%
			Rasio Pengelolaan Limbah B3 (540 industri)	33,34%
			Rasio timbunan sampah yang diangkut ke TPA	15,00%
			Rasio penggunaan Refrigerant (freon) non CFC	15,00%
20	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pengembangan sistem insentif dan disinsentif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan seperti industri dan pertambangan	Rasio insentif dan disentif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan	4,00%
21	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya penyelenggaraan transportasi yang terpadu, aman, tertib dan ramah lingkungan	Rasio pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan transportasi	7,33%
22	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan pada kondisi mantap 80 -90 % (rata – rata pada ruas jalan nasional, provinsi dan kabupaten / kota) dengan prioritas penanganan pada kawasan strategis (industri dan pariwisata)	Rasio Ruas Jalan Dalam Kondisi Mantap di WKP I (Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan)	89,96%
			Rasio Ruas Jalan Dalam Kondisi Mantap di WKP II (Kab. Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon)	92,89%
			Rasio Ruas Jalan Dalam Kondisi mantap di WKP III (Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak)	64,37%
23	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi	Rasio Realisasi dan Rencana pada Luas kawasan Budidaya (penurunan menjadi 69,85% sampai tahun 2029 menurut RTRWP)	10,00%
24	Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam perlindungan Sumberdaya Alam	Pembinaan kelompok masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	25,00%

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
			URAIAN	TARGET
1	2	3	4	5
25	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan pada kondisi mantap 80 -90 % (rata – rata) pada ruas jalan provinsi dengan prioritas penanganan pada kawasan strategis	Rasio Ruas Jalan Dalam Kondisi Mantap di WKP I (Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan)	89,96%
			Rasio Ruas Jalan Dalam Kondisi Mantap di WKP II (Kab. Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon)	92,89%
			Rasio Ruas Jalan Dalam Kondisi mantap di WKP III (Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak)	64,37%
26	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ	Meningkatnya Penyediaan fasilitas Transportasi	Rasio penyediaan fasilitas perhubungan Darat	8,06%
27	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Meningkatnya fungsi dan luas kawasan lindung mencapai kondisi 30 % luas wilayah melalui koordinasi penataan ruang daerah	Rasio Luas Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah	78,00%
28	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan pada kondisi mantap 80 -90 % (rata – rata) pada ruas jalan provinsi dengan prioritas penanganan pada kawasan strategis	Rasio Ruas Jalan Dalam Kondisi Mantap di WKP I (Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan)	89,96%
			Rasio Ruas Jalan Dalam Kondisi Mantap di WKP II (Kab. Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon)	92,89%
			Rasio Ruas Jalan Dalam Kondisi mantap di WKP III (Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak)	64,37%



GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH



NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
			URAIAN	TARGET
1	2	3	4	5
25	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan pada kondisi mantap 80 - 90 % (rata - rata) pada ruas jalan provinsi dengan prioritas penanganan pada kawasan strategis	Rasio Ruas Jalan Dalam Kondisi Mantap di WKP I (Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan)	89.96%
			Rasio Ruas Jalan Dalam Kondisi Mantap di WKP II (Kab. Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon)	92.89%
			Rasio Ruas Jalan Dalam Kondisi mantap di WKP III (Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak)	64.37%
26	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ	Meningkatnya Penyediaan fasilitas Transportasi	Rasio penyediaan fasilitas perhubungan Darat	8.06%
27	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Meningkatnya fungsi dan luas kawasan lindung mencapai kondisi 30 % luas wilayah melalui koordinasi penataan ruang daerah	Rasio Luas Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah	78.00%
28	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan pada kondisi mantap 80 - 90 % (rata - rata) pada ruas jalan provinsi dengan prioritas penanganan pada kawasan strategis	Rasio Ruas Jalan Dalam Kondisi Mantap di WKP I (Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan)	89.96%
			Rasio Ruas Jalan Dalam Kondisi Mantap di WKP II (Kab. Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon)	92.89%
			Rasio Ruas Jalan Dalam Kondisi mantap di WKP III (Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak)	64.37%

GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH